

Konsuler & Imigrasi

Pembangunan Pariwisata di Indonesia

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang unik, karena sifatnya yang sangat kompleks, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila pembangunan pariwisata harus ditinjau dari berbagai aspek kehidupan.

Pada hakekatnya, pembangunan pariwisata di Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya membicarakan tentang bagaimana menjaga kemampuan kondisi alam atau yang lebih dikenal dengan bio diversity tanah, air dan udara, tetapi juga semua aspek kehidupan perlu dilestarikan, termasuk kultur sosial manusianya.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional dapat meningkatkan peluang kerja, pendapatan negara dan penerimaan devisa.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, tidak terlepas dari perkembangan aspek-aspek penentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah pemasaran, produksi, aksesibilitas dan infrastruktur kepariwisataan.

Dalam aspek pemasarannya, Indonesia mempunyai peluang yang lebih baik karena citra pariwisatanya yang semakin baik. Selain event-event pariwisata dalam negeri makin terjadwal, pariwisata Indonesia juga telah melaksanakan promosi bersama dalam rangka kerjasama regional dan bilateral. Hal ini membuat kegiatan pemasaran dan produksi pariwisata semakin meningkat belakangan ini. Peluang Indonesia dalam aspek produk pariwisata adalah penambahan jumlah kamar hotel untuk menampung besarnya arus kunjungan wisatawan mancanegara. Disamping itu, seiring dengan peningkatan intensive group yang diangkut oleh Garuda Indonesia khususnya dari Jepang, posisi Indonesia sebagai "*New Convention Destination*" di Asia Pasifik semakin mantap.

Peluang Indonesia dalam aspek aksesibilitas dan infrastruktur adalah dengan dikembangkannya jalur-jalur penerbangan internasional ke beberapa kota diluar empat pintu gerbang utama, sehingga saat ini menjadi 23 pintu gerbang udara internasional. Selain itu disamping mengembangkan rute penerbangan dalam negeri yang menunjang pengembangan kepariwisataan daerah, jumlah kapal pesiar yang singgah di beberapa pelabuhan di Indonesia juga semakin meningkat. Dibalik faktor peluang, memang masih terdapat beberapa faktor tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Tantangan ini antara lain berupa munculnya destinasi baru seperti China, Kamboja, Vietnam, Thailand, Eropa Timur dan Taiwan.

Kendala lain yang masih dirasakan adalah belum terpadunya upaya promosi antara pemerintah dengan dunia usaha. Selain itu, informasi pasar yang belum memadai, khususnya dalam segmentasi pasar pariwisata.

Hal ini optimis dapat tercapai mengingat sarana pendukung pariwisata yang dimiliki. Pemerintah Indonesia akan secara konsisten mengembangkan faktor-faktor peluang yang ada, disamping itu berusaha menekan faktor-faktor tantangan yang akan menjadi kendala pencapaian sasaran tersebut.

Prospek Pariwisata

Pemerintah Indonesia dalam upaya menghimpun dana pembangunan yang diperlukan, baik dalam bentuk Rupiah maupun devisa, juga mengurangi ketergantungan ekonominya pada sektor minyak dan gas bumi. Adalah sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu andalan dalam perolehan devisa, dan bahkan diharapkan menjadi salah satu hasil utama devisa pada tahun 2005. Bersama itu, pariwisata akan tetap mengacu pada pertimbangan aspek-aspek sosial budaya dan lingkungan guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam sasaran program pariwisata tahun 2005, diperkirakan 11 juta wisatawan mancanegara akan mengunjungi Indonesia. Pada saat itu transportasi industri pariwisata Indonesia diharapkan menjadi penyumbang terpenting perolehan devisa, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah kepariwisataan. Oleh karena itu perolehan devisa pariwisata ditargetkan akan naik menjadi paling sedikit US\$ 15 milyar atau kurang lebih tiga kali lipat dari nilai pariwisata tahun 1995.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran program pariwisata tahun 2005 antara lain sebagai berikut:

Di bidang pemasaran. Dilakukan kampanye pemasaran dengan menjemput langsung wisatawan mancanegara di tempat asalnya. Sedikit lebih jauh, Direktorat Jenderal Imigrasi bahkan telah memberikan kebijaksanaan *Immigration Clearance on Board*, yaitu pemeriksaan keimigrasian, baik di atas pesawat udara maupun kapal laut dalam perjalanan menuju Indonesia. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi para wisatawan atau pengunjung singkat yang datang dengan pesawat Garuda dari Jepang (Tokyo dan Osaka), atau dari Taiwan (Taipei dan Kao Hsiung), dari keharusan antre di counter Imigrasi setibanya di Bandara Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai di Indonesia. Kemudahan ini juga berlaku bagi para penumpang kapal pesiar dari Thailand (Phuket), Malaysia (Port Klang, Penang, Malaka dan Langkawi), Papua Nugini (Port Moresby), Australia (Darwin, Sidney dan Perth) serta Filipina (Davao) pelabuhan tujuan di Indonesia, mereka bisa langsung berwisata karena pemeriksaan keimigrasiannya telah diselesaikan di atas pesawat atau kapal dalam perjalanan menuju Indonesia. Pejabat Imigrasi yang menyelesaikan penyelesaian Clearance Keimigrasian itu adalah Pejabat Imigrasi Indonesia yang diikutsertakan sebagai crew, dalam penerbangan atau pelayaran tersebut.

Di bidang produk wisata. Menetapkan produk wisata di kawasan Barat Indonesia dan meningkatkan percepatan pembangunan produk wisata di kawasan Timur Indonesia.

Bersama itu dilakukan pula peningkatan daya saing produk wisata di pasaran global melalui kebijaksanaan harga.

Upaya mengembangkan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu dan efektif antara lain dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global guna meningkatkan hubungan antar bangsa.

Di bidang Sumber Daya Manusia. Membentuk tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang pariwisata serta meningkatkan keramah-tamahan, kenyamanan dan kemudahan pelayanan di gerbang-gerbang wisata, obyek dan daerah wisata di Indonesia.

Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan telah dan makin ditingkatkan, disertai penyediaan sarana dan prasarana yang makin baik, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menjamin mutu dan kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.

Di bidang kelembagaan dan pengaturan. Pemerintah telah memantapkan produk dan pengaturan disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. *Di bidang prasarana dan aksesibilitas.* Membawa wisatawan mancanegara secara

langsung (Point to Point) dengan biaya yang wajar dan memperhatikan kenyamanan serta meningkatkan prasarana umum, seperti transportasi air, listrik dan telekomunikasi.

Di bidang investasi. Memberikan insentif untuk mendorong peningkatan investasi di kawasan Timur Indonesia sesuai dengan kondisi masing-masing, disamping pemantapan investasi di kawasan Barat Indonesia. *Di bidang lingkungan hidup.* Pembangunan pariwisata Indonesia berasaskan kualitas dan ramah lingkungan. *Di bidang perwilayahan.* Prioritas pembangunan daerah tujuan wisata disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. *Di bidang IPTEK dan sistem informasi.* Peningkatan informasi melalui simpul data base, unit informasi dan "Computer Reservation System" yang memadai. *Di bidang Fasilitas pendukung.* Memanfaatkan dan meningkatkan fasilitas pendukung seperti keamanan, kesehatan dan ketertiban.

Prospek Bisnis

Globalisasi yang didorong kemajuan pesat di bidang teknologi, terutama teknologi telekomunikasi, menyebabkan semakin derasnya arus informasi dengan segala dampaknya baik positif maupun negatif. Peluang yang timbul dari globalisasi adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Tantangan di bidang ekonomi, disamping makin kuatnya persaingan di pasaran internasional, adalah munculnya pengelompokan antar negara yang cenderung meningkatkan proteksionisme dan diskriminasi pasar yang dapat menghambat pasaran hasil produksi dalam negeri dan mendorong persaingan yang kurang sehat.

Kriteria penilaian daya saing global oleh World Economic didasarkan pada 8 kriteria, yakni:

1. Keterbukaan perekonomian terhadap sistem perdagangan dan keuangan internasional.
2. Peranan anggaran dan regulasi pemerintah.
3. Perkembangan pasar finansial.
4. Kualitas infrastruktur.
5. Kualitas teknologi.
6. Kualitas manajemen bisnis.
7. Fleksibilitas pasar tenaga kerja.
8. Kualitas kelembagaan hukum dan politik.

Salah satu asas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional adalah asas manfaat, yang menyatakan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warganegara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Faktor dominan yang menjadi modal dasar pembangunan nasional adalah wilayah Indonesia

yang luas dan berkedudukan di katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alamnya yang memiliki berbagai keunggulan komparatif.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang makin meningkat memerlukan biaya yang makin besar yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai dari sumber dana dalam negeri. Oleh karena itu juga diperlukan pembiayaan dari sumber dana luar negeri sebagai pelengkap.

Peranan modal dalam negeri dan modal asing makin didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Kemudahan dan iklim investasi yang lebih menarik terus dikembangkan, antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijakan ekonomi makro yang tepat.

Gejolak moneter yang sempat mengguncang dunia belakangan ini, ternyata tidak mempengaruhi minat para investor baik dari dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena jangka waktu investasi yang bersifat panjang dan menengah, serta kepercayaan para investor akan prospek perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Gejolak moneter yang mengakibatkan krisis mata uang ternyata tidak membuat krisis kepercayaan di bidang investasi, khususnya di Indonesia. Pada umumnya para investor menilai bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia bersifat terbuka dan untuk jangka panjang prospeknya sangat menarik. Tingkat pertumbuhan ekonomi di negeri ini akan mencapai 7% per tahun dengan pendapatan perkapita US\$ 1,000 per tahun.

Hikmah yang dapat dimanfaatkan pasca gejolak moneter ini adalah suatu kesimpulan bahwa investasi yang paling menguntungkan saat ini adalah investasi yang berorientasi ekspor, sebab peluangnya makin besar. Walaupun biaya produksi dalam Rupiah akan naik, namun harga jualnya dalam bentuk Dollar AS yang bernilai tinggi. Potensi ekspor furniture dari Jawa Tengah, ataupun kerajinan rakyat pendukung pariwisata dari Bali misalnya, peluangnya cukup besar karena banyak diminati oleh pengusaha-pengusaha asing. Demikian pula peluang dari bidang usaha agroindustri, akan menjadi semakin besar.

Indonesia membina industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional lainnya, agar menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan makin mampu meningkatkan perannya di dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen, baik bagi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan industri kecil dan menengah diberi kemudahan, baik dalam permodalan, perizinan maupun pemasarannya. Selain itu, juga ditingkatkan keterkaitannya dengan industri yang berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan.

Trend perkembangan ekspor kerajinan di Bali misalnya, menggambarkan hari depan yang cerah bagi para pengrajin industri kecil pendukung pariwisata. Dalam dua atau tiga tahun belakangan ini para pengrajin itu telah naik derajatnya menjadi eksportir ketika mereka mulai berhubungan dengan bisnis lintas benua. Pola hubungan bisnis mereka itu umumnya sama: Kedatangan wisatawan asing yang tertarik untuk berbisnis dengan mereka. Dengan pesanan dari para tamu itu, pintu ekspor terbuka bagi para pengrajin yang sebelumnya hanya bertindak sebagai supplier bagi *art shop* yang besar.

Yang disebut sebagai wisatawan asing disini, sesungguhnya tidak bisa dikatakan sebagai wisatawan murni, karena mereka melakukan transaksi dagang meskipun tidak dalam jumlah yang besar.

Mereka itu pada umumnya adalah orang-orang asing pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memanfaatkan *fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)*, atau pemegang *Visa Kunjungan Usaha (VKU)*. Dari kacamata keimigrasian, bahwa pemegang fasilitas BVKS maupun VKU untuk melakukan transaksi perdagangan tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan.

Selain transaksi jual beli, mereka juga diperkenankan untuk melakukan peninjauan ke lapangan untuk membicarakan barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha ekspor / impor. Dan masih banyak lagi kemudahan keimigrasian bagi mereka untuk melakukan kegiatan usaha tidak untuk bekerja. Selain faktor keimigrasian, sarana dan prasarana di Indonesia saat ini telah cukup mendukung setiap kegiatan bisnis dan pariwisata.

Komunikasi dan telekomunikasi yang lancar karena telepon telah menjangkau desa-desa, serta berhasilnya program listrik masuk desa pada awal tahun 1990, turut memberikan andilnya dalam memperlicin mekanisme pasar langsung ke sarannya.

Namun permasalahan yang menjadi tantangan dalam bidang-bidang usaha tersebut adalah kendala pendanaan, sumber daya manusia dan teknologi yang masih tradisional. Sebagai pengusaha-pengusaha kecil, mereka tidak mampu memenuhi permintaan dalam skala yang besar. Oleh karena itu peranan investor sangat diperlukan untuk memanfaatkan komoditas primer agar diolah dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah. Di bidang-bidang tersebut lebih diperlukan Penanaman Modal Asing karena jangkauan pemasaran mereka lebih luas disamping mereka juga memiliki modal dan teknologi yang unggul.

Dalam mengembangkan teknik produksi, diterapkan berbagai rencana produksi manufaktur progresif, agar terjamin transformasi teknologi secara berkesinambungan dan terarah. Perkembangan teknik produksi barang dan jasa di luar negeri yang lebih maju perlu diikuti, dipelajari dan dipahami disertai upaya penyesuaian, peningkatan keterampilan dan prestasi kerja.

Pemerintah terus mendorong peningkatan penguasaan teknik produksi dalam pengembangan industri, termasuk kemampuan rancang bangun dan rekayasa, agar lebih menjamin dihasilkannya barang dan jasa yang unggul dalam mutu, serta mampu bersaing di pasar luar negeri.